

## Pengaruh Konsentrasi Partai Politik di Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah <sup>☆</sup>

### *Impact of Political Concentration in the Regional Government to the Regional Economic Growth*

Catur Sugiyanto<sup>a,\*</sup>, Budiono S. Handoko<sup>a</sup>, Ilham Adinusa<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*

---

#### Abstract

In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth. This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

**Keywords:** Political Power, Economic Growth, Herfindahl Hirschman Index

#### Abstrak

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektifitas pengeluaran pemerintah. Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan *Herfindahl Hirschman Index* (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

**Kata kunci:** Kekuasaan Politik, Pertumbuhan Ekonomi, *Herfindahl Hirschman Index*

**JEL classifications:** H11, P16

---

<sup>☆</sup>Penulis sangat berterimakasih kepada *anonymous referee* yang telah memberikan komentar, saran perbaikan, dan kritik terhadap studi ini. Kami telah berusaha mengakomodirnya di dalam revisi sehingga presentasi kami menjadi semakin jelas. Namun demikian, segala kekurangan dan kesalahan tetap menjadi tanggung jawab penulis.

\*E-mail: [caturesugiyanto@yahoo.com](mailto:caturesugiyanto@yahoo.com).

## Pendahuluan

Proses demokratisasi memosisikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi telah memberikan ruang kebebasan yang lebih besar termasuk di bidang ekonomi. Oleh karena itu, ekonom mulai menga-

mati bagaimana kaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen (1996), peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mempertanyakan hubungan kausal antara rezim pemerintahan yang otoriter terhadap kemajuan ekonomi. Sen (1996) mengungkapkan bahwa dari data statistik seratus negara terbukti bahwa dampak positif sebuah rezim pemerintahan yang otoriter terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Argumen Sen tersebut senada dengan Barro (1996), bahwa munculnya kebebasan di negara-negara otoriter memang menghidupkan ekonomi, namun begitu sebuah tingkat demokrasi tercapai, pertumbuhan ekonomi di negara-negara otoriter itu mengalami kemunduran. Dalam era demokrasi tersebut masyarakat mulai meminta tambahan pembelanjaan kesejahteraan sosial, sementara negara otoriter biasanya tidak memiliki mekanisme demokratis untuk mengatur aspirasi tersebut.

Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom, menyimpulkan bahwa demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi (Barro, 1999; Boediono, 2008). Menurut pandangan ahli-ahli ini, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah, aturan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi semata. Apabila simpulan ini benar maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan mereka dapat memperbaiki aturan hukum (*rule of law*). Oleh karena itu, masih perlu dicari bukti empiris bagaimana sebenarnya kaitan antara bentuk rezim pemerintahan (demokratis *vs* otoriter) terhadap kinerja ekonomi (misalnya, pertumbuhan ekonomi).

Dalam dinamika demokrasi di Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini juga didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pilkada secara langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi terutama di tingkat daerah setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004.

Perekonomian daerah pascaotonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pembuat kebijakan di daerah tersebut untuk mengelola keuangannya sendiri dengan pengawasan dari anggota legislatif di daerah. Badan legislatif daerah yang terdiri dari berbagai macam unsur partai politik ini memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah di daerah. Akan tetapi, sejauh mana dampak dinamika multipartai yang tercermin dalam kekuatan pemerintah daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut masih belum jelas. Apakah semakin besar kemungkinan partai terlibat di dalam pemerintahan dengan disertai alokasi anggaran yang terdesentralisasi (memberikan kesempatan yang lebih luas) dan berarti demokratis akan menunjang pertumbuhan ekonomi atau justru menghambat? Semakin banyaknya jumlah partai di suatu daerah, namun dikuasai oleh partai tertentu (menjadi kurang demokratis, karena dominasi satu partai) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau justru menahan?

Studi yang memasukkan variabel-variabel politik seperti kekuatan pemerintah, polarisasi antarpemerintah, dan fragmentasi politik dalam kajian ekonomi politik memang sudah dilakukan. Namun, studi yang ada baru sebatas pada kebijakan fiskal yang berhubungan dengan defisit anggaran, utang, dan efisiensi. Sementara itu, kajian yang melihat pengaruh kekuatan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dalam konteks demokrasi politik di era otonomi daerah di Indonesia dengan sistem multipartai belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis pengaruh konsentrasi partai politik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekuatan pemerintah daerah (terkonsentrasi atau tersebar di beberapa partai) terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintahan koalisi biasanya akan saling memengaruhi antar-anggota koalisi yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Kebijakan yang diambil pun akan saling memengaruhi. Kematangan konsolidasi akan dipengaruhi oleh kekuatan koalisi tersebut. Begitu pula halnya pemerintahan dengan mayoritas satu partai akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Keterwakilan partai dalam pemerintah daerah di Indonesia sangat beragam. Beberapa daerah memiliki pemerintah yang kuat didukung partai politik sehingga setiap kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal. Jika partai yang terlibat dalam koalisi pemerintah daerah relatif lebih banyak, kecil kemungkinan koordinasi dan konsolidasi berjalan dengan optimal. Kondisi ini dapat membentuk ketidakharmonisan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam merumuskan anggaran yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas, studi ini akan dimulai dengan bagian tinjauan referensi yang menguraikan berbagai studi sebelumnya terkait kekuatan politik daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian bagian metode yang menerangkan model yang digunakan di dalam analisis. Selanjutnya bagian hasil dan analisis yang menguraikan data yang digunakan dan juga pembahasan, dan bagian simpulan sebagai penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi kebijakan.

## Tinjauan Referensi

Pengaruh politik dalam kebijakan ekonomi menjadi kajian menarik oleh para ekonom dalam dua dekade terakhir. Sebagaimana diungkapkan Sen (1996), variabel-variabel politik

merupakan variabel yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika perekonomian sebuah negara. Barro (1996) menggarisbawahi pentingnya hukum yang berlaku, keterbukaan pasar, konsumsi pemerintah yang sedikit, dan sumber daya manusia yang tinggi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di 100 negara antara tahun 1960 dan 1990.

Faktor politik bisa berpengaruh melalui berbagai aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, perbaikan institusi politik dan hukum (Petraikos *et al.*, 2007). Dengan demikian kondisi stabilitas makroekonomi masih merupakan kondisi yang perlu (*necessary*), tetapi belum cukup (*sufficient*) untuk pertumbuhan ekonomi (Fischer, 1993).

Bagaimana mekanisme transmisi atau jalur pengaruh politik terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Roubini dan Sach (1989) melihat pengaruh kekuatan pemerintah terhadap defisit anggaran menggunakan pendekatan *prisoner's dilemma*<sup>1</sup>. Pemerintahan mayoritas dengan satu partai adalah bentuk pemerintahan paling kuat karena pemerintahan mengendalikan parlemen *vis a vis* oposisi dan menghadapi konflik internal yang tidak terlalu signifikan mengenai kebijakan penganggaran.

Sementara itu, pemerintahan koalisi menghadapi lebih banyak konflik internal dalam kebijakan penganggaran. Logikanya adalah bahwa mengurangi defisit anggaran dapat dianggap sebagai barang publik dalam pemerintahan koalisi. Setiap partai ingin mengonsumsi barang publik (dari pengurangan defisit) tanpa membayarnya dengan cara memotong pengeluaran-pengeluaran yang menguntungkan kelompoknya. Semakin banyak partai yang

<sup>1</sup> *The prisoner's dilemma* adalah contoh kanonik dari sebuah analisa permainan di dalam *game theory* yang menunjukkan kemungkinan dua orang tidak bekerja sama, bahkan jika kemungkinan tersebut merupakan kepentingan terbaik mereka untuk melakukannya. Teori ini dikemukakan oleh Merrill Flood dan Melvin Dresher.

terlibat dalam koalisi, kecil kemungkinan koordinasi dalam defisit anggaran akan sukses.

Di sisi lain, Allesina dan Drazen (1991) menggunakan model teori permainan (*war of attrition*<sup>2</sup>) untuk menjelaskan bagaimana pemotongan anggaran pemerintah dan kenaikan pajak untuk stabilisasi sulit dicapai. Kenaikan pajak yang berarti memberikan beban lebih pada suatu kelompok masyarakat akan ditentang dengan cara kelompok masyarakat tersebut berusaha memengaruhi keputusan pemerintah untuk menunda keputusan atau menghindarkannya meskipun dengan suatu pengorbanan. Selama besarnya pengorbanan masih lebih rendah daripada besarnya beban pajak yang harus ditanggung, maka kelompok masyarakat ini akan terus menerus memengaruhi pemerintah untuk menunda keputusan kenaikan pajak (berarti menghindarkan kelompok masyarakat dari beban pajak).

Apabila di dalam masyarakat ada dua kelompok (partai) yang berkuasa, maka kedua kelompok ini berlomba untuk memengaruhi pemerintah supaya tidak mengenakan pajak (misalnya sebesar  $0,5V$ ) terhadap kelompoknya. Karena tidak ada pajak (penerimaan pemerintah) maka alokasi anggaran kepada kelompok ini menjadi menurun (misalnya sebesar  $b$ ). Apabila kedua partai ini bersepakat untuk ber-

sedia menerima  $b$ , maka keduanya diuntungkan sebesar  $0,5V - b$ , karena beban pajak yang seharusnya dibayar masing-masing partai adalah  $0,5V$ . Kondisinya akan lain, jika kedua partai berlomba memengaruhi pemerintah, sebagaimana suatu permainan. Jika partai 1 bersedia menerima  $b_1$  dan partai 2 bersedia menerima  $b_2$ , dan  $b_1 > b_2$ , dan pemerintah mengikuti alokasi yang rendah dan mengenakan pajak kepada yang kalah (kelompok 1) sebesar  $0,5V$ , maka pemerintah akan mengalokasikan anggaran kepada kedua partai sebesar  $b_2$ . Partai 1 memperoleh "keuntungan" sebesar  $b_2 - 0,5V$  (menerima alokasi anggaran  $b_2$  dan membayar pajak  $0,5V$ ) dan partai 2 memperoleh keuntungan  $0,5V + b_2$  (tidak terbebani pajak sebesar  $0,5V$  dan menerima alokasi anggaran sebesar  $b_2$ ). Partai akan berlomba untuk menentukan nilai  $b$  yang serendah-rendahnya supaya terhindar dari membayar pajak.

Apabila kedua partai menentukan  $b$  sebesar 0 (nol), maka keduanya akan membayar pajak sebesar  $0,5V$  dan tidak menerima alokasi anggaran. Partai besar (yang memiliki uang banyak) akan bisa bertahan, sementara partai kecil akan terlempar. Koalisi besar akan bertahan, sementara koalisi kecil akan kalah. Akibatnya, kekuasaan akan berkumpul pada satu kelompok. Dengan demikian defisit yang besar searah dengan koalisi atau pemerintahan yang terpusat pada suatu kelompok.

Mengenai bukti empiris dari efek kekuatan pemerintah dan penyebaran kekuasaan dalam pemerintah terhadap defisit anggaran, Roubini dan Sachs (1989) menemukan tendensi bahwa defisit yang lebih besar terjadi pada negara-negara dengan jumlah partai politik yang besar di parlemen. Namun hasil studi ini dipertanyakan secara serius oleh studi-studi yang dilakukan sesudahnya. Edin dan Ohlsson (1990) berargumen bahwa indeks penyebaran kekuasaan politik yang digunakan oleh Roubini dan Sachs lebih menangkap efek dari pemerintahan minoritas daripada pemerintahan dengan koalisi mayoritas. Oleh karena itu, pemerintahan

<sup>2</sup>Di dalam teori permainan, *the war of attrition* adalah model persaingan di mana dua kontestan bersaing untuk sebuah sumber daya nilai  $V$  misalnya, dengan cara bertahan sambil terus mengakumulasikan biaya dalam kurun waktu tertentu selama kontes berlangsung. Model ini awalnya dirumuskan oleh John Maynard Keynes. Cara kerja permainan ini sebagai berikut: Setiap pemain membuat tawaran, pemain yang tawarannya tinggi memenangkan sumber daya senilai  $V$ . Setiap pemain membayar senilai tawaran yang lebih rendah. Jika pemain yang tawarannya lebih rendah memiliki nilai tawaran sebesar  $b$ , maka pemain ini kehilangan (kalah dan harus membayar sebesar  $b$  dan pemain lainnya (yang menawar lebih tinggi dari  $b$ ) akan mendapatkan keuntungan dengan sejumlah  $V - b$ , karena dia hanya diminta membayar sebesar tawaran terendah (yaitu  $b$ ) dan dia menang memperoleh nilai  $V$ . Jika kedua pemain memiliki nilai tawaran yang sama  $b$ , mereka membagi nilai  $V$ , masing-masing mendapatkan  $(V/2) - b$ .

dengan satu partai hanya dapat dinilai mempunyai defisit anggaran yang kecil dalam perbandingan dengan pemerintahan minoritas, bukan pemerintahan koalisi secara umum. Ketika memeriksa kembali efek dari indeks penyebaran kekuatan politik dan memperluas kelompok data sampai kepada dekade-dekade sebelumnya, Edin dan Ohlsson (1990) juga melihat hubungan kekuatan pemerintah dengan defisit anggaran. Mereka mengkonstruksi indeks kekuatan negara yang dihitung dari penjumlahan jumlah rata-rata partai dalam pemerintahan pada tahun sebelumnya, jumlah dari tabungan pemerintah selama tahun sebelumnya, dan variabel *dummy* yang mengindikasikan tahun pemilihan sebelumnya. Jumlah yang lebih tinggi mengimplikasikan pemerintah yang lebih lemah. Studi ini juga memasukkan variabel *dummy* yang mengindikasikan peningkatan yang tinggi dalam tingkat pengangguran dan pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) yang rendah, dan menginteraksikannya dengan indeks kekuatan pemerintahan. Temuannya menyimpulkan bahwa pemerintah yang lemah memiliki defisit yang lebih tinggi, namun pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang 'melempem' (*sluggish*). Temuan mereka tidak memiliki variabel politik yang kehadirannya secara otomatis menyebabkan defisit yang lebih tinggi, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Ashworth dan Heyndels (2001) mampu memberikan bobot kepada hipotesis mengenai pemerintahan yang lemah. Mereka mengonsentrasikan tinjauan pada struktur pajak di antara negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan menemukan korelasi yang signifikan antara struktur pajak yang ketat dengan pemerintahan koalisi yang lemah. Ide dasarnya adalah struktur pajak yang ideal. Ketika struktur pajak aktual jauh dari kondisi ideal yang mungkin terjadi karena *shock* eksogen, untuk mengembalikan pada kondisi semula jauh lebih sulit dan memakan waktu yang

lebih lama ketika pemerintah lemah dan lebih terfragmentasi.

Jika Borrelli dan Royed (1995) meneliti mengenai kekuatan pemerintah *vis a vis* oposisi, Volkerink dan De Haan (2001) meninjau beberapa aspek dari fragmentasi politik dalam parlemen dan di antara anggota-anggota koalisi, karena koherensi ideologis dari kabinet dalam pemerintahan sangat mungkin memiliki peranan dalam hasil akhir kebijakan. Menggunakan data dari 22 negara OECD dalam kurun waktu sepanjang tahun 1972–1996, mereka menemukan bahwa fragmentasi pemerintahan yang lebih tinggi, yang diukur dengan belanja menteri (*spending ministers*) dalam pemerintahan menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi. Namun, fragmentasi politik dari pemerintah (diukur dengan bantuan skala ideologi politik satu dimensi kiri-kanan) memengaruhi defisit anggaran pemerintah pusat. Semakin terfragmentasi keseluruhan parlemen (termasuk partai-partai oposisi), semakin besar defisit anggaran pemerintah pusat.

Volkerink dan De Haan (2001), yang merupakan peneliti awal tentang peran fragmentasi politik dalam pemerintahan koalisi dan menganalisis pengaruh dari fragmentasi terhadap defisit anggaran. Namun demikian, dalam sudut pandang Huber *et al.* (2003), pengukuran dari fragmentasi politik (dan ideologi) adalah masalah yang *tricky*. Polarisasi ideologi dari partai-partai koalisi yang diukur dengan skala satu dimensi "kiri-kanan" dapat menyebabkan masalah klasifikasi, contohnya pada negara dengan jumlah partai yang besar, berkompetisi untuk mendapatkan suara pada beberapa isu multidimensi, atau ketika fraksi yang berbeda dari sebuah partai besar dalam koalisi percaya dan memegang teori yang berbeda. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa fragmentasi dalam pemerintahan haruslah secara lebih akurat menjelaskan kekuatan dari anggota koalisi dalam pembentukan atau pembubaran pemerintahan.

Secara umum, sebuah partai lebih berkuasa

jika partai ini: (1) lebih krusial bagi koalisi untuk memperoleh kekuasaan mayoritas di parlemen, dan (2) jika lebih banyak pilihan yang dimilikinya dari luar untuk membentuk pemerintahan mayoritas dengan partai-partai lain di parlemen. Kekuasaan partai koalisi dan penyebaran kekuasaan dalam sebuah koalisi juga akan menjadi penting ketika tiba saatnya untuk mendistribusikan beban jika diperlukan untuk melakukan penyesuaian anggaran. Politikus lokal berusaha memengaruhi alokasi anggaran supaya kepercayaan masyarakat kepada partai menjadi semakin besar, terutama dari konstituen. Oleh karena itu, politikus lokal bersifat oportunistik (Alesina *et al.*, 1997), memengaruhi APBD agar bisa dipilih kembali. Bukti empiris mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dikuasai oleh satu partai politik dibandingkan dengan daerah lain yang dikuasai oleh beberapa partai politik (koalisi) memberikan indikasi bagaimana kaitan antara kekuatan partai politik dengan kinerja ekonomi. *Bargaining* antara bupati/walikota dengan parlemen lokal bisa mengarah pada negatifnya pengaruh anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan temuan Mariyono dan Saputro (2009) yang mengklaim bahwa semakin banyak partai dan jumlah kursi mereka di dalam parlemen akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Huber *et al.* (2003) menganalisis pengaruh kekuatan negara terhadap tingkat defisit dan hutang pada 21 negara OECD dari tahun 1970–1999. Simpulan studi tersebut menyebutkan bahwa persebaran yang tinggi dalam *voting power* dari pemerintahan koalisi menyebabkan akumulasi hutang yang lebih sedikit (stabilitas hutang lebih sukses).

Dari berbagai studi di atas, secara virtual, dalam Diagram Kartesius kemungkinan hubungan antara konsentrasi partai dengan pertumbuhan ekonomi bisa dipotret sebagaimana pada Gambar 1<sup>3</sup>. Apakah bukti empiris di In-

donesia selama 2004 dan 2009 mengarah pada posisi di Kuadran I, II, III atau IV?

## Metode

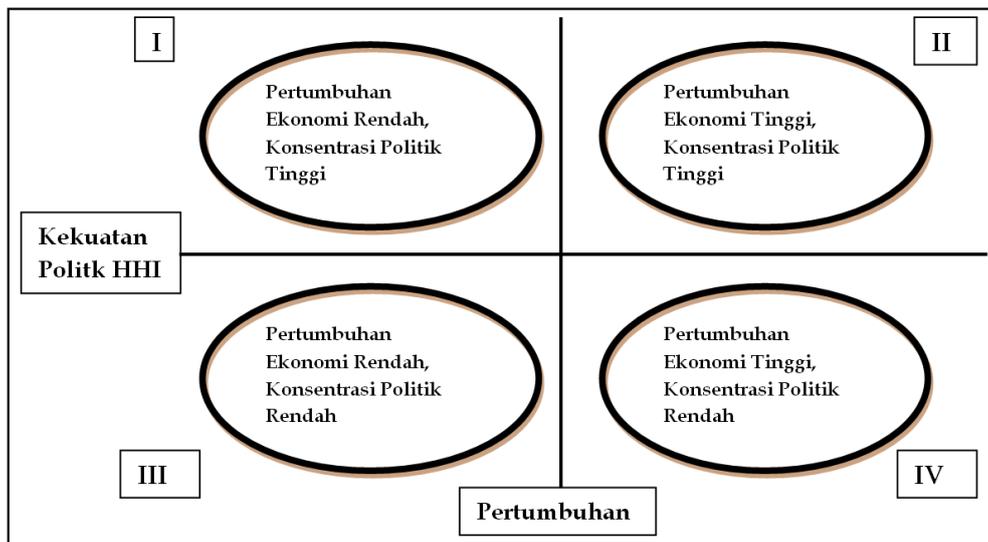
Dari berbagai studi di atas terlihat bahwa persebaran *voting power*, konsentrasi partai politik atau koalisi akan memengaruhi pola alokasi anggaran, yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi suatu negara/daerah. Banyak cara mengukur bagaimana konsentrasi tersebut, salah satunya adalah Edin dan Ohlsson (1990) yang mengkonstruksi indeks kekuatan negara yang dihitung dari penjumlahan jumlah rata-rata partai dalam pemerintah pada tahun sebelumnya, jumlah dari tabungan pemerintah selama tahun sebelumnya, dan variabel *dummy* yang mengindikasikan tahun pemilihan sebelumnya. Volkerink dan De Haan (2001) mengukur fragmentasi politik dari pemerintah dengan bantuan skala ideologi politik satu dimensi kiri-kanan. Identik dengan penjumlahan rata-rata partai di dalam pemerintahan, indeks konsentrasi partai politik menggunakan *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) mungkin bisa dilakukan<sup>4</sup>. Dengan menggunakan HHI, maka *share* (peran) partai politik diukur secara kuadratik, semakin besar pangsa suatu partai politik di suatu daerah maka semakin besar nilai indeks HHI. Di samping berbagai analisis mengenai peran politik melalui anggaran di atas, tidak dipungkiri bahwa faktor pertumbuhan ekonomi neoklasik seperti kapital, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan masih mendominasi pertumbuhan ekonomi di Asia, termasuk Indonesia (Lee dan Hong, 2010). Oleh karena itu, variabel ini masih dipergunakan sebagai variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah.

Model dasar pertumbuhan ekonomi dalam studi ini merujuk pada Todaro (2004) yang

<sup>3</sup>Penulis sangat berterima kasih untuk visualisasi sebagaimana disarankan *referee*.

<sup>4</sup> $H = \sum_{i=1}^N s_i^2$ , di mana  $s_i = share$  partai  $i$  di suatu daerah,  $N =$  jumlah partai,  $H = Herfindahl Hirschman Index$ .

Gambar 1: Diagram Kartesius



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

menyatakan bahwa terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain: (1) akomodasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak akumulasi kapital; dan (3) kemajuan teknologi. Ketiga faktor tersebut juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*).

Selain variabel tersebut, pengeluaran pemerintah menjadi variabel penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Pengeluaran pemerintah menentukan besarnya belanja modal yang akan menentukan kapasitas produksi masyarakat (Rustiono, 2008; Mangkoesobroto, 1988). Apalagi di dalam era desentralisasi, banyak sekali daerah yang kegiatan ekonominya sangat tergantung pada APBD. Barro dan Sala-i-Martin (1995) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan jasa-jasa

infrastruktur, perlindungan hak kepemilikan, dan pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi. *Output* yang dihasilkan oleh pemerintah menjadi masukan (*input*) bagi sektor swasta dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Sesuai dengan teori Musgrave (1959) dan Rostow (1962), pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar pula. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial.

Pola alokasi belanja pemerintah daerah sangat dipengaruhi konstelasi politik di daerah. Semakin besar tingkat desentralisasi politik daerah akan semakin besar dampaknya terhadap produktivitas belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah yang tidak mempertimbangkan

kebutuhan masyarakat dianggap tidak berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi daerah tersebut. Dalam hal ini, tingkat desentralisasi politik di daerah diukur dengan menggunakan konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah.

Secara umum model pertumbuhan konvensional yang dapat dipertimbangkan untuk kasus ini adalah:

$$g_i = \theta_i + \theta_i \tau_i + \theta_2 FD_i + \theta_3 PD_i + \theta_4 n_i + \theta_5 X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

#### Definisi Operasional Variabel:

$g$  = **Pertumbuhan Ekonomi** adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita pada kabupaten/kota sampel, menggunakan satuan persen (%);

$\theta_i \tau_i$  = **Pengaruh konsentrasi partai politik** dalam DPRD di setiap kabupaten/kota diukur dengan HHI mendekati 1 berarti *single majority* (konsentrasi tinggi) dan HHI mendekati 0 (nol) berarti kekuatan partai politik tersebar merata, banyak sekali partai;

$PD$  = **Indikator Pengeluaran Desentralisasi Fiskal**, yaitu merupakan rasio total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat;

$FD$  = **Indikator Penerimaan Desentralisasi Fiskal**, yaitu merupakan rasio Penerimaan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah;

$n$  = **Human Capital** diukur melalui jumlah penduduk yang sekolah hingga tamat SMA, diukur dengan satuan persen (%);

$X$  = **Level Awal Pertumbuhan ( $IL_PDRB$ )** merupakan tingkat PDRB riil per kapita yang dimiliki suatu daerah pada periode sebelumnya, menggunakan satuan jutaan rupiah. Mengikuti Barro (1996), variabel ini mengukur tingkat konvergensi perekonomian antardaerah;

$POP$  = **Pertumbuhan Populasi** di setiap kabupaten/kota diukur dengan satuan persen (%);

$Dummy1 = 0$  adalah data tahun 2004, 1

adalah data tahun 2009;

$Dummy2 = 0$  adalah sampel kabupaten/kota yang berada di pulau Jawa, 1 adalah sampel kabupaten/kota yang berada di luar pulau Jawa.

Analisis ditujukan untuk menjawab bagaimana konsentrasi partai politik di daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat perannya di dalam penentuan alokasi anggaran. Secara ekstrem ada 2 hal, *pertama*, pemerintah koalisi lebih lemah daripada pemerintahan dengan 1 partai mayoritas. *Kedua*, pemerintahan minoritas adalah sebab utama dari kinerja fiskal yang lemah.

Mengikuti logika tersebut, maka ada beberapa kemungkinan, *pertama*, **single majority**, di mana fokus anggaran pada konstituen, mayoritas masyarakat, sehingga anggaran terutama pemerataan dapat diprioritaskan untuk melanggengkan kekuasaan (mengorbankan *growth*).

*Kedua*, **koalisi sama kuat**, di mana fokus anggaran kepada masing-masing konstituen, menyebar (merata), mungkin tidak fokus, tetapi kesempatan *growth* lebih baik.

*Ketiga*, **koalisi mayoritas dan minoritas** di mana mungkin agak fokus tetapi anggota koalisi menjadi penyebab tidak fokusnya alokasi anggaran sehingga pemerataan mungkin lebih dominan, *leader* mengusahakan agar tidak kehilangan konstituen, dan mengusahakan menambah pemilih.

Dan *keempat*, **kekuatan partai yang merata** menyebabkan tidak ada pihak yang memikirkan masa depan bangsa, partai politik bersifat *short-vision* (proyeksi lima tahunan), anggaran terfokus kepentingan konstituen – pertumbuhan mungkin baik (karena anggaran merata).

Indeks HHI, hanya mampu mengukur konsentrasi satu partai (HHI mendekati 1) atau tidak terkonsentrasi (merata) HHI mendekati 0 (nol) (Tabel 1).

**Tabel 1:** Konsentrasi Partai Politik di DPRD

Koalisi/Ter-Konsentrasi	Kekuatan Partai Merata	Pertumbuhan	Pemerataan
Satu Partai	<i>No</i>	<i>Yes/No</i>	<i>Yes/No</i>
Koalisi Multipartai	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes?</i>
Koalisi Multipartai	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Yes?</i>
Tidak Ada Koalisi	<i>Yes</i>	<i>Yes?</i>	<i>Yes?</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

## Hasil dan Analisis

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data sekunder, yang terdiri atas 55 kabupaten/kota. Karena terbatasnya kemampuan mengakses data, maka data yang lengkap untuk variabel-variabel yang diamati hanya tersedia untuk tahun 2004 dan 2009 (terutama mengenai komposisi partai politik di parlemen). Dengan menggunakan HHI, maka kategori konsentrasi parlemen dikelompokkan sebagai berikut:

- HHI > 0,25 : konsentrasi yang tinggi;
- 0,15 < HHI < 0,25 : konsentrasi moderat;
- HHI < 0,15 : tidak terkonsentrasi.

Dengan pedoman tersebut maka untuk periode 2004–2009, daerah dikelompokkan menjadi seperti pada Tabel 2 dan 3 (lampiran).

Secara grafis, konsentrasi anggota dewan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, hubungan negatif antara konsentrasi partai politik dan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2004 terlihat pada Gambar 2 (gambar berserak (*scatter diagram*)) serta Tabel 4 (pada lampiran).

Berdasarkan Gambar 2, ada 2 daerah yang sangat ekstrem, yaitu memiliki konsentrasi yang sangat tinggi (diatas 0,5) dan pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu: Kabupaten Berau Dalam dengan HHI 0,54, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan HHI 0,52. Kelompok kedua adalah 6 daerah dengan tingkat konsentrasi sekitar 0,3 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu: Aceh Utara, Kabupaten Yapen, Kota Gorontalo, Kabupaten Timor Tengah Utara, Jayapura, dan Ma-

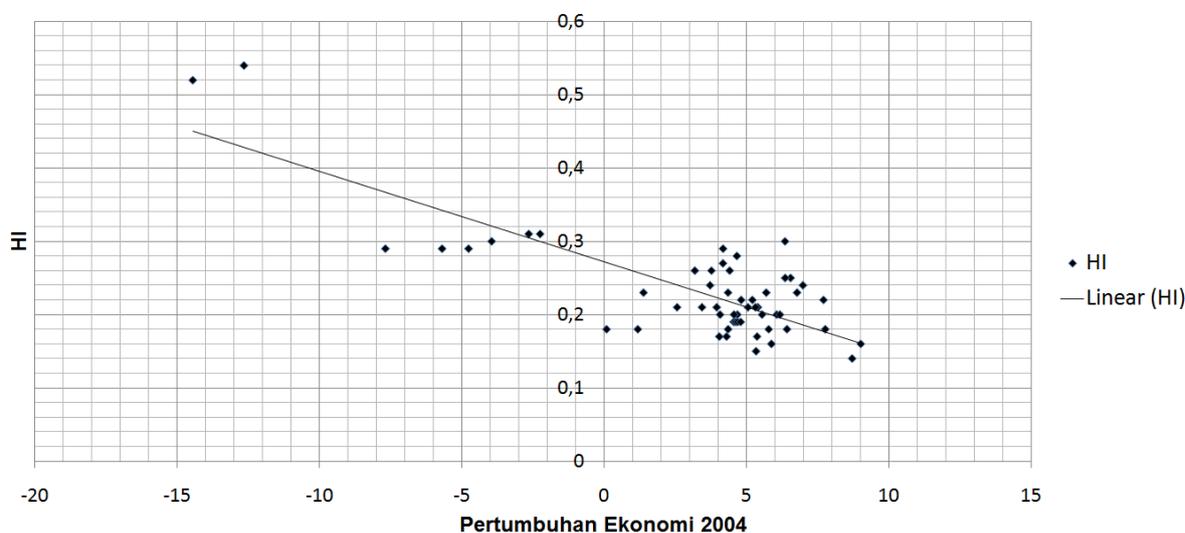
diun. Kelompok ketiga adalah daerah-daerah dengan tingkat HHI antara 0,15 sampai 0,3. Kelompok daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan positif antara 0 sampai 9%.

Gambaran tersebut mencerminkan bagaimana situasi di daerah pada awal duduknya parlemen daerah hasil pemilu 2004. Mungkin, parlemen yang masih baru ini tidak atau belum banyak mewarnai alokasi anggaran daerah. Namun demikian, mengingat sebagian besar dari anggota dewan adalah anggota dewan yang pada periode sebelumnya juga sudah berada di parlemen, mungkin mereka sudah mampu memengaruhi keputusan alokasi anggaran. Hanya saja mereka ini harus menahan diri mengingat adanya sebagian anggota dewan yang baru, sehingga komunikasi di antara mereka di dalam memengaruhi alokasi anggaran belum begitu baik.

Apabila perhatian difokuskan pada kelompok daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, maka terlihat pola yang jelas bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan konsentrasi anggota parlemen di daerah. Dari kelompok daerah ini terlihat bahwa, dua daerah yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi memiliki tingkat konsentrasi parlemen yang paling rendah. Sementara beberapa daerah yang tingkat konsentrasi parlemennya sangat tinggi, masih mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi di kelompok tengah, dan 2 daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling bawah mempunyai tingkat konsentrasi sekitar 0,19.

Hubungan negatif antara konsentrasi partai politik dan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2009 terlihat pada Gambar 3 (gambar berserak

**Gambar 2:** Pengaruh Konsentrasi Partai Politik (HI) di DPRD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (*Growth*) pada Tahun 2004



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

(*scatter diagram*)) serta Tabel 5 (pada lampiran).

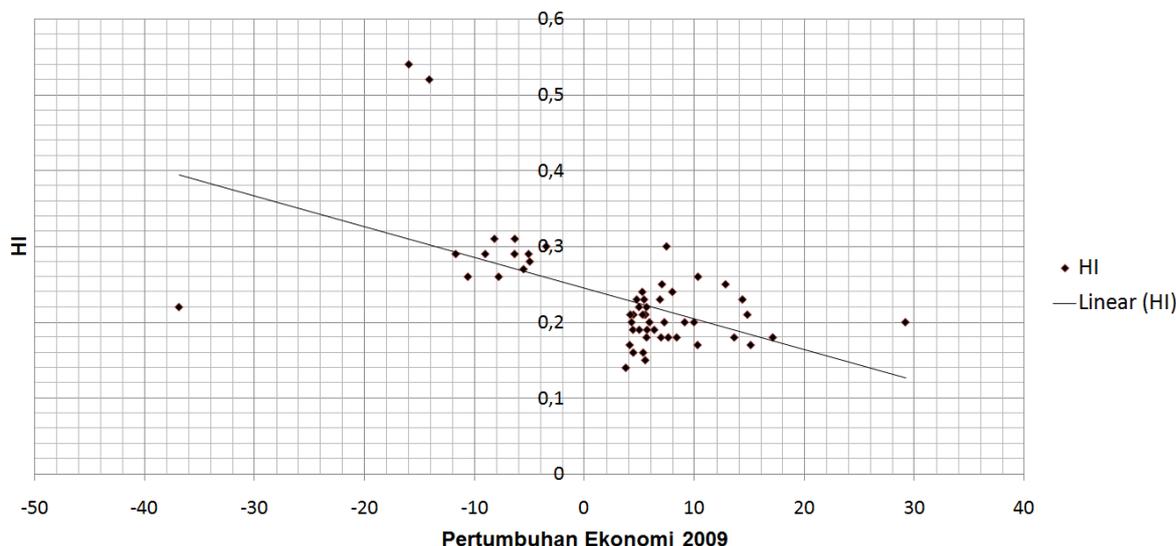
Gambaran secara umum hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsentrasi parlemen masih terlihat pada tahun 2009. Dengan tingkat konsentrasi yang tidak berubah, mengingat hasil pemilihan umum parlemen tahun 2004 masih menempatkan dewan tersebut pada tahun 2009, pola pertumbuhan daerah sudah mulai berubah. Meskipun diakui bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, faktor konsentrasi parlemen menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Apabila diperhatikan mengenai daerah-daerah yang ekstrem, terlihat dua daerah dengan tingkat konsentrasi tinggi memiliki pertumbuhan yang negatif. Meskipun demikian, ada daerah yang pertumbuhannya negatif meskipun tingkat konsentrasinya rendah dan daerah yang pertumbuhannya positif tinggi dengan tingkat konsentrasi yang relatif sama. Apabila perhatian terfokus pada dua kelompok *scatter* tersebut terlihat adanya hubungan

negatif antara tingkat konsentrasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan pola hubungan tersebut terlihat dari adanya beberapa daerah yang posisinya ekstrem, yaitu daerah dengan konsentrasi sangat tinggi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi mempunyai tingkat konsentrasi yang agak rendah (mendekati 0,2), daerah yang mempunyai tingkat konsentrasi rendah namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang negatif. Di luar 2 kelompok ekstrem tersebut, ada 2 kelompok yang menunjukkan hubungan negatif lebih jelas antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsentrasi.

Tabel hasil estimasi (Tabel 6 pada lampiran) mengonfirmasi adanya pengaruh negatif tingkat konsentrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada persamaan tahun 2004 pengaruh negatif tingkat konsentrasi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kuat dibandingkan pada persamaan 2009. Fenomena ini mungkin berkaitan dengan semakin dekatnya masa pemilu 2009 sehingga parlemen tidak begitu gencar dalam

**Gambar 3:** Pengaruh Konsentrasi Partai Politik (HI) di DPRD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (*Growth*) pada Tahun 2009

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

memengaruhi alokasi anggaran. Apabila demikian, maka proses demokrasi di daerah perlu dicermati dan dominasi suatu partai politik tertentu bisa dikelola untuk pertumbuhan ekonomi.

Sistem *threshold* di tingkat lokal yang memungkinkan partai yang memperoleh suara sangat sedikit tidak bisa ikut di daerah yang bersangkutan memberikan kemungkinan terjadinya keseimbangan kekuatan antarpolisi. Namun, mungkin penerapannya tidaklah sederhana, mengingat partai biasanya bersifat terpusat, demikian pula penerapan *threshold*-nya. Atau, sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pusat dan daerah mungkin bisa mengurangi efek negatif dari tingginya konsentrasi tersebut.

Variabel-variabel derajat fiskal dan sumber daya manusia terlihat, seperti yang diharapkan. Tingginya derajat fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Diskresi yang diberikan kepada daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur alokasi anggaran sesuai prioritas di daerah. Demikian ju-

ga mengenai kebebasan daerah dalam menggalang sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan desentralisasi seperti ini perlu didorong terus mengingat bukti-bukti empiris yang menunjukkan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan tenaga kerja di daerah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, bahwa kualitas tenaga kerja akan memberikan tenaga kerja efektif di dalam proses produksi. Pada akhirnya, jumlah tenaga kerja saja tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi juga mengonfirmasi hal ini. Jumlah populasi tidak signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Perilaku pertumbuhan ekonomi di daerah untuk tahun 2004 dan 2009 ternyata sama, sebagaimana ditunjukkan variabel *dummy* tahun (*D-year*) yang tidak signifikan. Perilaku pertumbuhan ekonomi di Jawa dan di luar Jawa juga tidak berbeda. Hal ini menunjukkan bah-

wa faktor tahun dan daerah tidak akan membedakan pola pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, secara umum kemampuan menjelaskan perilaku pertumbuhan ekonomi di daerah masih terbatas. Model pertumbuhan baru mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sekitar 70%. Masih ada sekitar 30% variasi pertumbuhan ekonomi daerah yang perlu dijelaskan dalam studi selanjutnya.

## Simpulan

Studi ini menunjukkan adanya pengaruh negatif konsentrasi partai politik di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin terkonsentrasi dan semakin kuat anggota parlemen suatu partai politik tertentu menguasai parlemen, berpengaruh terhadap alokasi anggaran sehingga pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Fenomena ini mengonfirmasi hipotesis bahwa terkonsentrasinya parlemen pada suatu partai politik tertentu memengaruhi bagaimana alokasi anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)). Alokasi yang hanya memperhatikan konstituen partai politik yang menguasai parlemen di daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi daerah yang perekonomiannya sangat tergantung APBD, maka konsentrasi partai politik di parlemen akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, mekanisme alokasi anggaran yang cenderung mengikuti kehendak parlemen perlu dihindari. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan pusat dan manajemen pembangunan regional yang baik, mungkin bisa mengurangi efek negatif konsentrasi tersebut.

Studi ini juga mengonfirmasi berbagai pendapat dan hasil studi, bahwa desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan daerah, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Fenomena ini sejalan

dengan ruh otonomi, memberikan kemungkinan yang paling besar kepada daerah untuk memilih prioritas pembangunan daerahnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terpacu.

Kualitas sumber daya manusia, bukan jumlah penduduk, juga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas sumber daya manusia menjadikan tenaga kerja efektif di dalam proses produksi. Pada akhirnya tenaga kerja efektif ini mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil studi ini merekomendasikan untuk meningkatkan derajat fiskal di daerah, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, daerah didorong untuk yakin bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, upaya alokasi dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung.

## Daftar Pustaka

- [1] Alesina, A., Spolaore, E., & Wacziarg, R. (1997). Economic Integration and Political Disintegration. *NBER Working Papers*, 6163. National Bureau of Economic Research.
- [2] Alesina, A. & Drazen, A. (1991). Why are Stabilizations Delayed? *American Economic Review*, 81 (5), 1170-1188.
- [3] Ashworth, J. & Heyndels, B. (2001). Political Fragmentation and the Evolution of National Tax Structures in the OECD. *International Tax and Public Finance*, 8 (4), 377-393.
- [4] Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. *Journal of Economic Growth*, 1, 1-27
- [5] Barro, R. J. (1999). Determinants of Democracy. *Journal of Political Economy*, 107 (S6), S158-S183.
- [6] Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. I. (1995). *Economic Growth*. Singapore: McGraw Hill.
- [7] Boediono. (2008). Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1), 1-17.
- [8] Borrelli, S. A. & Royed, T. J. (1995). Government 'Strength' and Budget Deficits in Advanced Democracies. *European Journal of Political Research*, 28 (2), 225-260.
- [9] Edin, P-A. & Ohlsson, H. (1990). Political De-

- terminants of Budget Deficits: Coalition Effects Versus Minority Effects. *Papers 1990k, Uppsala-Working Paper Series*.
- [10] Fischer, S. (1993). The Role of Macroeconomic Factors in Growth. *NBER Working Papers, 4565*. National Bureau of Economic Research, Inc.
- [11] Huber, G., Kocher, M., & Sutter, M. (2003). Government Strength, Power Dispersion in Governments and Budget Deficits in OECD-Countries: A Voting Power Approach. *Public Choice, 116* (3/4), 333–350.
- [12] Lee, J-H. & Hong, K. (2010). Economic Growth in Asia: Determinants and Prospects. *ADB Economics Working Paper Series, 220*. Asian Development Bank.
- [13] Mangkoesoebroto, G. (1998). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [14] Mariyono, J. & Saputro, E. N. M. (2009). Political Determinants of Regional Economic Growth in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Public Administration, 31* (1), 39–56.
- [15] Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
- [16] Petrakos, G., Arvanitidis, P., & Pavleas, S. (2007). Determinants of Economic Growth: The Experts' View. *DYNERG Working Papers, DYNREG20*. Dublin: Economic and Social Research Institute (ESRI). Dynamic Regions in a Knowledge-Driven Global Economy Lessons and Policy Implication for the EU. [http://www.esri.ie/research/research\\_areas/international\\_economics/dynreg/papers/Working\\_Paper\\_No.\\_20.pdf](http://www.esri.ie/research/research_areas/international_economics/dynreg/papers/Working_Paper_No._20.pdf) (Accessed April 18, 2012).
- [17] Rostow, W. W. (1962). *The Stages of Economic Growth*. London: Cambridge University Press.
- [18] Roubini, N. & Sachs, J. (1989). Government Spending and Budget Deficits in the Industrial Economies. *NBER Working Papers, 2919*. National Bureau of Economic Research.
- [19] Rustiono, D. (2008). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [20] Sen, A. (1996). Rationality, Joy and Freedom. *Critical Review: A Journal of Politics and Society, 10* (4), 481–494.
- [21] Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi, Edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- [22] Volkerink, B. & de Haan, J. (2001). Political and Institutional Determinants of the Tax Mix: An Empirical Investigation for OECD Countries. *Research Report, 99E05*. University of Groningen, Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management).

**Tabel 2:** Konsentrasi Partai Politik di DPRD pada Periode 2004–2009

HHI > 0,25	0,15 < HHI < 0,25	HHI < 0,15
18 Kabupaten/Kota	39 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota
Aceh Utara	Aceh Barat Daya	Kabupaten Kudus
Banjar	Bantul	Kota Palangkaraya
Banyumas	Bengkalis	
Berau Dalam	Bireuen	
Jayapura	Bojonegoro	
Kabupaten Lamongan	Boven Digoel	
Kabupaten Paser	Brebes	
Kabupaten Sumenep	Cirebon	
Kabupaten Timor Tengah Selatan	Gunung Kidul	
Kabupaten Timor Tengah Utara	Indragiri Hulu	
Kabupaten Yapen	Kabupaten Kampar	
Keerom	Kabupaten Kotabaru	
Kota Gorontalo	Kabupaten Lampung selatan	
Kota Singkawang	Kabupaten Lombok Tengah	
Madiun	Kabupaten Lombok Timur	
	Kabupaten Lumajang	
	Kabupaten Merauke	
	Kabupaten Muaro Jambi	
	Kabupaten Ngawi	
	Kabupaten Pematang	
	Kabupaten Puncak Jaya	
	Kabupaten Purwakarta	
	Kabupaten Sekadau	
	Kabupaten Siak	
	Kabupaten Sumba Barat	
	Kabupaten Tebo	
	Karawang	
	Kota Bekasi	
	Kota Depok	
	Kota Kupang	
	Kota Pekalongan	
	Kota Samarinda	
	Kota Sukabumi	
	Kota Tarakan	
	Kota Ternate Kabupaten Lampung Tengah	
	Sukabumi	
	Tegal	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

**Tabel 3:** Dominasi Partai Politik di Daerah pada Periode 2004–2009

Golkar	PDIP	Partai Islam
Aceh Utara	Bantul	Banjar
Bengkalis	Banyumas	Bekasi
Berau	Brebes	Bireuen
Boven Digoel	Cirebon	Bojonegoro
Gorontalo	Lumajang	Depok
Gunung Kidul	Madiun	Kudus
Indragiri Hulu	Ngawi	Lamongan
Jayapura	Palangkaraya	Sumenep
Karawang	Pekalongan	
Keerom	Pemalang	
Kotabaru	Singkawang	
Kupang	Tegal	
Lampung Selatan		
Lampung Tengah		
Lombok Tengah		
Lombok Timur		
Muaro Jambi		
Purwakarta		
Samarinda		
Sekadau		
Siak		
Sukabumi		
Sukabumi		
Tarakan		
Tebo		
Timor Tengah Selatan		
Timor Tengah Utara		
Yapen		

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

**Tabel 4:** Daerah-Daerah yang Memiliki Hubungan Negatif Antara Konsentrasi Partai Politik dan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2004

Pertumbuhan Ekonomi Negatif	HHI > 0,5	HHI 0,3–0,5	HHI 0,15–0,3
-10 sampai -15	Berau Dalam Timor Tengah Selatan		
-5 sampai -10			Jayapura Keerom
-0 sampai -5		Timor Tengah Utara Yapen Aceh Utara	Madiun

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

**Tabel 5:** Daerah-Daerah yang Memiliki Hubungan Negatif Antara Konsentrasi Partai Politik dan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2009

Pertumbuhan Ekonomi Negatif	HHI > 0,5	HHI 0,3-0,5	HHI 0,15-0,3
Diatas -15		Puncak Jaya	
-10 sampai -15	Berau Dalam Timor Tengah Selatan		Keerom Banjar
-5 sampai -10		Aceh Utara Yapen	Jayapura Paser Lamongan Madiun
-0 sampai -5		Timor Tengah Utara	Singkawang

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

**Tabel 6:** Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Variabel	Pooled 2004-2009		2004		2009	
	Koefisien	Statistika t	Koefisien	Statistika t	Koefisien	Statistika t
C	4,54	1,99	7,26**	-0,14	-0,53	4,26
PD	6,72**	2,06	6,17**	2,62	42,5**	2,91
FD	0,49**	4,84	0,22**	2,63	0,47**	2,51
X	-0,00	-0,58	-0,00	-0,36	-0,00	-1,36
$\theta_i\tau_i$	-29,77**	-4,67	-31,41**	-1,72	-19,74*	-6,16
n	0,28**	8,58	0,48**	4,96	0,23**	3,65
POP	0,04	0,49	-0,04	0,39	0,04	-0,22
<i>Dummy1</i>	0,44	0,45				
<i>Dummy2</i>	0,78	0,94				
$R^2$	0,77		0,83		0,80	
F	44,29		38,78		33,07	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: \* signifikan pada taraf 10%

\*\* signifikan pada taraf 5%